

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Konsep dynamic governance adalah bagaimana bekerjanya kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidak menentuan dan perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat. Konsep Dynamic Governance dari Neo, Boon and Chen (2007) terdiri dari tiga indikator utama yaitu, think ahead, think again, dan think across

Dynamic governance dengan ketiga indikator utama yang menjadi acuan utama dalam mengukur seberapa capaian target pada desa wae ajang menunjukkan bahwa tingkat berpikir kedepan pemerintah desa telah berhasil diterapkan dengan menjalankan beberapa bagian utama visi seperti dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Yang didukung oleh beberapan elemen utama seperti BPD, aparat desa dan juga masyarakat Desa Wae Ajang sendiri.

Dynamic governance pada tingkat berpikir kembali di tunjukan bahwa mekanisme evaluasi rutin yang memberikan umpan balik atas program-program pembangunan yang dilaksanakan menunjukkan adanya proses refleksi, penilaian ulang capaian, serta identifikasi kendala untuk perbaikan

kebijakan dan program di masa mendatang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut imenjadi landasan utama keberhasilan Desa Wae Ajang.

Untuk mendukung keberhasilan suatu desa tentunya ketiga indikator ini diimplemtasikan dengan tepat, Namun Tingkat berpikir lintas batas di desa wae ajang belum terimplementasi secara nyata beberapa alasan bahwa desa sendiri belum memiliki pengalaman melakukan studi banding ke desa lain maupun menjalin kerja sama formal dengan sektor swasta, LSM, atau desa lain. Pemerintah desa lebih banyak mengandalkan program internal yang didanai melalui Dana Desa dan APBDes tanpa adanya pertukaran ide atau adopsi praktik terbaik dari luar. Beberapa alasan juga adanya keterbatasan anggaran, kurangnya prioritas, serta kebiasaan yang masih mengandalkan cara kerja internal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip Dynamic Governance di Desa Wae Ajang, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan program desa perlu ditingkatkan informasi terkait program agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan dapat dipahami oleh seluruh masyarkat. Forum musyawarah desa juga harus dapat lebih dihidupkan sebagai wadah penyerapan aspirasi.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk mendukung prinsip Dynamic Governance, desa disarankan mulai memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem administrasi desa digital, aplikasi pengaduan masyarakat, dan penyebaran informasi program melalui media sosial desa.

3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Desa Wae Ajang diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan, sehingga prinsip Think Across benar-benar terwujud.